

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI HARGA MINYAK GORENG TERHADAP KINERJA USAHA KULINER DI KOTA BENGKULU

Yanto Effendi, Sulisti Afriani, Rina Trisna Yanti

Universitas Dehasen Bengkulu

Jl. Meranti No. 32, Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, 38228

Email: yantoeffendi357@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh kebijakan Pemerintah mengenai minyak goreng, Harga minyak goreng terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu. Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai signifikansi kebijakan Pemerintah mengenai minyak goreng sebesar 0,01 ($< 5\%$) ini artinya kebijakan Pemerintah mengenai minyak goreng berpengaruh terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu, sedangkan harga minyak goreng sebesar 0,04 ($< 5\%$) artinya harga minyak goreng berpengaruh terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu. Nilai signifikansi pada uji F sebesar 0,03 ($< 5\%$) bahwa secara simultan bahwa kebijakan pemerintah mengenai minyak goreng, harga minyak goreng berpengaruh terhadap minat usaha kuliner di Kota Bengkulu. Nilai R^2 sebesar 0,721 yang artinya 72,1% variabel kinerja usaha dipengaruhi oleh variabel kebijakan pemerintah dan harga minyak goreng dan 27,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Harga, Kinerja Usaha

A. PENDAHULUAN

Dalam perspektif global kebutuhan masyarakat terkait dengan kementerian perdagangan dan beberapa kebijakan pemerintah yang langsung dapat diterapkan dikalangan masyarakat bawah. Diakhir tahun 2021 masyarakat mulai merasakan adanya kenaikan terhadap harga kebutuhan pokok yang secara berkala melonjak secara terus menerus ini juga yang sangat dirasakan oleh masyarakat menengah, terutama terhadap kebutuhan Minyak Goreng diseluruh pelosok Indonesia. Usaha Usaha kecil menengah yang menjadi lending sektor perdagangan menjadi wacana pemerintah untuk menggerakkan secara bersama diseluruh Indonesia agar dapat menjadi penyeimbang harga kebutuhan masyarakat sampai ke pelosok negeri ini untuk penanganan harga kebutuhan bahan pokok masyarakat.

Minyak goreng salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting untuk kegiatan sehari-hari, dengan adanya kebijakan mengenai harga minyak goreng dapat membantu masyarakat atau industri-industri kecil. Karena harga minyak goreng yang tinggi selama ini, memaksa masyarakat harus berpikir ulang untuk produksi usaha yang dilakukan. Kebijakan pemerintah mengenai harga minyak goreng ini untuk membantu masyarakat agar tetap memproduksi dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah mengenai harga minyak goreng ini dengan antusias di sambut oleh masyarakat, setidaknya dengan kebijakan dapat membantu meringankan ekonomi keluarga ataupun badan usaha.

Harga minyak yang tinggi dipasaran selama ini, menjadi salah satu hambatan terutama bagi usaha kuliner., karena konsumen masih menuntu dengan kualitas yang sama dan tidak mau tahu, bagaimana dengan bahan yang di dapat bagi usaha kuliner. Dengan harga minyak yang tinggi mempunyai pengaruh yang besar bagi usaha kuliner terutama di Kota Bengkulu, untuk

mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan dan yang akan dijual, mau tidak mau para pembisnis usaha kuliner harus mempunyai strategi agar kinerja usahanya tetap berjalan.

B. LANDASAN TEORI

Kebijakan Pemerintah

Menurut Islamy (2000) kebijakan bermula dari bahasa *wisdom* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Kebijakan sebagai satu keputusan yang diambil berdasarkan analisa yang telah dipertimbangkan yang diperbolehkan ataupun dilarang (Keban, 2008). Menurut Anderson yang dikemukakan oleh Islamy (2000) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah mendefinisikan kebijakan Pemerintah adalah suatu usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah yang difasilitasi bagian permodalan dan peralatan produksi.

Menurut Wahab (2005) menjelaskan kebijakan Pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan untuk bertransaksi yang berorientasi pada tujuan dan masalah tertentu. Proses kebijakan Pemerintah dikemukakan oleh James Anderson (dalam Dydiet, 2013) adalah formulasi masalah, Formulasi kebijakan, Penentuan kebijakan, Implementasi kebijakan dan Evaluasi kebijakan.

Harga

Swasta Candraditya (dalam Idris 2013), harga adalah sejumlah uang (apabila ada kemungkinan dapat ditambahkan beberapa barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Suparyanto dan Rosad (2015), harga adalah jumlah sesuatu yang memiliki nilai pada umumnya berupa uang yang harus dikorbankan untuk mendapatkan suatu produk. Suparyanto dan Rosad (2015), terdapat beberapa tujuan ditetapkan harga suatu produk, antara lain :

- a. Mencapai keuntungan
- b. Mencapai tingkat penjualan
- c. Mencapai pangsa pasar
- d. Menciptakan *good image*
- e. Mengurangi persediaan produk
- f. Menjadi strategi bersaing

Kotler dan Armstrong (2008) suatu perusahaan harus menetapkan harga untuk pertama kali ketika perusahaan tersebut mengembangkan atau memperoleh suatu produk baru, perusahaan harus memutuskan di mana akan memposisikan produknya berdasarkan kualitas dan harga. Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam kebijakan harganya, berikut prosedur dalam menetapkan harga yaitu : 1) memilih tujuan penetapan harga, 2) menentukan permintaan, 3) Memperkirakan biaya, 4) menganalisis biaya, harga dan penawaran pesaing, 5) memilih metode penetapan harga dan 6) memilih harga akhir.

Konsep Kinerja Usaha

Konsep kinerja dapat didefinisikan sebagai semua pencapaian hasil atau degree. Kinerja organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauhmana usaha tersebut dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat menerapkan konsep kinerja usaha diperlukan adanya prasyarat dasar yang harus dipenuhi yaitu : 1) adanya suatu indikator, 2) semua ukuran kinerja tersebut biasanya dituangkan dalam suatu bentuk kesepakatan

antara atasan dan bawahan, 3) Terdapat suatu proses siklus manajemen kinerja yang dikerjakan bersama, 4) adanya suatu sistem reward dan punishment, 5) terdapat suatu mekanisme penilaian kinerja, 5) terdapat suatu gaya kepemimpinan (Amirullah, 2015)

Bisnis Kuliner Di Kota Bengkulu

Persaingan bisnis kuliner yang ada di Kota Bengkulu sudah tidak dapat dihindari, ini terlihat dengan banyaknya usaha kuliner yang bermunculan di kota Bengkulu, terkait kebijakan pemerintah yang saat ini sedang berjalan dan penuh dengan polemik yang ada atas kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang membantu menurunkan harga minyak goreng atau memberikan kebijakan satu harga minyak goreng sangat dibutuhkan oleh masyarakat namun pelaksanaannya banyak menuai pro dan kontra dan menjadi peluang bagi distributor atau agen-agen sampai ke tingkat ritel melakukan penimbunan terhadap keberadaan minyak goreng tersebut, sehingga yang kita rasakan pada saat ini minyak goreng menjadi langka, serta masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan pasokan minyak goreng tersebut. Dampak yang terjadi juga dirasakan oleh pelaku kuliner yang berada di propinsi Bengkulu khususnya kota Bengkulu. Sehingga kebijakan tersebut dinilai satu sisi dibutuhkan masyarakat. Kinerja pelaku usaha kuliner juga merasakan terganggu terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Hipotesis Penelitian

1. Diduga kebijakan Pemerintah mengenai minyak goreng berpengaruh terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu.
2. Diduga harga minyak goreng berpengaruh terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu
3. Diduga kebijakan pemerintah, harga minyak goreng berpengaruh terhadap minat usaha kuliner di Kota Bengkulu.

C. METODE PENELITIAN

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif, yang merupakan kegiatan setelah data dari seluruh subjek atau sumber data lain terkumpul. Jumlah Populasi yang di ambil yaitu semua usaha kuliner di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Sedangkan sampel berjumlah 150 usaha kuliner di Kecamatan Singaran Pati, dimana teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling method*.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan :

1. Uji Linearitas

Uji ini digunakan melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak dengan signifikan 5%.

2. Uji Normalitas

Uji ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Untuk menentukan normalitas menggunakan signifikansi α sebesar 5%, dengan kriteria Jika $Sig > 5\%$ (Normal) dan Jika $Sig < 5\%$ (Tidak Normal).

3. Persamaan Regresi

$$KU = a + b_1KP + b_2HM + e$$

Keterangan :

- KU = Kinerja Usaha
- a = Konstanta
- KP = Kebijakan Pemerintah
- HM = Harga Minyak
- b1...b2 = Koefisien Regresi
- e = error

4. Uji Secara Parsial (t-test)

Pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t-tes, yaitu untuk melihat kebijakan Pemerintah mengenai harga minyak (X1), harga minyak (X2) berpengaruh dengankinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu dengan tingkat signifikansi 5%

5. Uji Secara Simultan (F-test)

Pengujian hipotesis secara simultan yatiu melihat secara bersama-sama kebijakan Pemerintah mengenai harga minyak (X1), harga minyak (X2) berpengaruh dengankinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu dengan tingkat signifikansi 5%.

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi vaerial dependen.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik

1. Uji Linearitas

Tabel 1. Hasi Uji Linearitas

Variabel	D-W	Kriteria Pengujian	Keterangan
KU, KP, HM	1,825	DW > DU 1,825 > 1,7602	Bebas Autokorelasi

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Hasil pengujian linearitas didapat nilai *Durbin-Watson* 1,825 dengan jumlah $n= 150$, $k=3$, nilai $DU = 1,76725$ lebih besar dari nilai $DU = 1,7602$ dimana terletak di antara Nilai $dL= 1,7062$ dan nilai $dU= 1,7602$ artinya bebas dan dapat dilanjutkan.

2. Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas

Variabel	N	K-S	Asymp.sig	Keterangan
KU	150	0,931	0,85	Normal
KP	150	1, 611	0.71	Normal
HM	150	1, 235	0.95	Normal

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Pada Tabel 2 nilai *KS* variabel KP diperoleh 0,85, HM diperoleh 0,95 dan KU diperoleh angka 0,85, ini berarti bahwa nilai *Asymp. Sig* berada di atas atau lebih besar dari 5% dan data terdistribusikan secara normal.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil pengujian diperoleh nilai R^2 diketahui bahwa kebijakan Pemerintah dan harga minyak goreng mempengaruhi kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu sebesar 72,1% dan sisanya sebesar 27,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang digunakan.

4. Uji Secara Parsial (t-tes)

Tabel 3. Hasil Pengujian Secara Parsial (T-tes)

Variabel Independen	t_{hitung}	Siq	Keterangan
KP	0,01	5%	Diterima
HM	0,04	5%	Diterima

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Pada Tabel 3 diperoleh nilai kebijakan Pemerintah mengenai minyak goreng (X1) sebesar 0,01 ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah mengenai minyak goreng berpengaruh terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu, sedangkan variable harga minyak goreng sebesar 0,04 menunjukkan bahwa harga minyak goreng berpengaruh terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu

5. Uji Secara Simultan (Uji F)

Nilai signifikansi pada uji F diperoleh nilai 0,034 ($< 5\%$) ini menunjukkan bahwa bahwa secara simultan bahwa kebijakan pemerintah mengenai minyak goreng, harga minyak goreng berpengaruh terhadap minat usaha kuliner di Kota Bengkulu.

Maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 43,45 + 0,109KP + 0,101HM + 5,498e$$

E. KESIMPULAN

Secara parsial menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah mengenai minyak goreng terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu, Harga minyak goreng berpengaruh terhadap kinerja usaha kuliner di Kota Bengkulu. Secara simultan bahwa kebijakan pemerintah mengenai minyak goreng, harga minyak goreng berpengaruh terhadap minat usaha kuliner di Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Dydiet. 2013. *Manajemen Keuangan, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Ekonisa.
- Idris, 2013, Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, dan Harga dan Promosi terhadap Keputusan Mobil Jenis MPV merek Toyota Kijang Innova di Semarang, Diponegoro *Journal of Management, Vol 2, Nomor 3, Hal 1-10*.
- Islamy. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kotler dan Armstrong, Garry. 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jilid 1., Erlangga, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Suparyanto & Rosad. 2015. *Manajemen Pemasaran*. IN MEDIA: Bogor
- Suriyanti Linda Hetri dan Binangkit Intan Diane .2019. Peran Kebijakan Pemerintah dsalam Memoderasi Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Usaha (Studi Kasus Pada UMKM Bidang Makanan Dan Minuman Di Kota Pekan Baru, *Jurnal Akuntansi & Ekonomika Vo. 9 No. 1, Juni 2019*
- Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zulfikar. 2018. *Manajemen Pemerintahan* . Vol 13 No. 7 Tahun 2018 Jurnal Lentera